



BUPATI LEMBATA

PENGUMUMAN

NOMOR : BU.800 /1384/BKPSDMD/2021

Dari : BUPATI LEMBATA
Ditujukan : Para Pencari Kerja
Tanggal : 30 Juni 2021
Tentang : Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata

ISI PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 777 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/863/M.SM.01.00/2021, tanggal 24 Juni 2021, Hal Penjelasan Teknis Penyesuaian Kualifikasi Pendidikan Pada Penetapan Kebutuhan ASN Tahun 2021, maka dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

I. ALOKASI FORMASI

Pemerintah Kabupaten Lembata akan membuka lowongan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2021 sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) formasi, terdiri dari:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 152 (seratus lima puluh dua) formasi yang dikhususkan untuk tenaga guru.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) formasi, dengan rincian:
 - a. Tenaga Kesehatan sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) formasi.
 - b. Tenaga Teknis sejumlah 66 (enam puluh enam) formasi.

II. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI ASN (CPNS DAN GURU PPPK)

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1.	Pengumuman seleksi ASN	30 Juni sampai 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran seleksi ASN	30 Juni sampai 21 Juli 2021
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi ASN	28 sampai 29 Juli 2021
4.	Masa sanggah	30 Juli sampai 1 Agustus 2021
5.	Pengumuman pasca sanggah	9 Agustus 2021
6.	Pelaksanaan SKD CPNS	25 Agustus sampai 4 Oktober 2021
7.	Pelaksanaan seleksi PPPK Guru	Agustus sampai Desember (jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh kemendikbudristek.
8.	Pengumuman hasil SKD CPNS	17 sampai 18 Oktober 2021
9.	Pelaksanaan SKB CPNS	8 sampai 29 November 2021
10.	Pengumuman kelulusan ASN	18 sampai 19 Desember 2021
11.	Masa sanggah	20 sampai 22 Desember 2021
12.	Pengumuman pasca sanggah	30 sampai 31 Desember 2021
Ket.: waktu bersifat tentatif		

III. PERSYARATAN

A. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

1. Persyaratan Umum

- 1.1. Setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan persyaratan:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta.
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
- 1.2. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - 1.3. Pelamar yang berasal dari lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 1.4. Batas usia tertinggi sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1. huruf a dikecualikan bagi pelamar pada jabatan tertentu yaitu dokter dengan kualifikasi pendidikan spesialis, dengan batas usia tertinggi 40 (empat puluh) tahun.
 - 1.5. Pelamar pada jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar.
 - 1.6. STR sebagaimana dimaksud pada angka 1.5 harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
 - 1.7. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
 - 1.8. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada angka 1.7, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
 - 1.9. Pelamar dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh panitia seleksi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
2. Persyaratan Khusus
 - 2.1. Penyandang disabilitas dapat melamar sepanjang memenuhi segara persyaratan sebagai berikut;
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

Formasi Khusus Penyandang Disabilitas :

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Kerja Penempatan
1	Terampil - Paramedik Veteriner	DIII Peternakan	1	Dinas Peternakan / Bidang Bina Usaha, Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya / Seksi Sumber Daya Lahan dan Air
2	Terampil - Auditor	D-III Manajemen Akuntansi / D-III Ekonomi Manajemen / D-III Perpajakan / D-III Manajemen Administrasi Keuangan / D-III Akuntansi / D-III Ekonomi Akuntansi / D-III Manajemen Administrasi Perkantoran	1	Inspektorat
3	Ahli Pertama-Perawat	Ners	1	Rumah Sakit Umum Daerah
4	Ahli Pertama-Perawat	Ners	1	Puskesmas Lewoleba

- 2.2. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada semua jabatan formasi umum **kecuali** untuk jabatan **AHLI PERTAMA - POLISI PAMONG PRAJA**, dengan ketentuan sebagai berikut:
- pelamar dapat melamar pada jabatan yang persyaratan jabatannya dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dan memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan.
 - melampirkan surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
 - menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

- B. Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
1. Segala ketentuan dan persyaratan lamaran menjadi Guru PPPK akan diinformasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat diakses pada portal SSCASN.
 2. Kualifikasi pendidikan Guru PPPK mengacu pada SE Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1460/B.B1/GT.02.01/2021 dapat diakses pada portal SSCASN.
 3. Hal-hal yang belum jelas terkait seleksi pengadaan Guru PPPK dapat dikomunikasikan dengan Panitia Seleksi Daerah di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui web info GTK.

IV. PELAMARAN

1. Pelamaran dilakukan secara daring melalui portal SSCASN disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
2. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK.
3. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.
4. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK, atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jadwal, alur pendaftaran dan informasi lainnya dapat diakses pada portal SSCASN BKN dan website resmi Pemerintah Daerah <https://lembatakab.go.id>.
6. Panitia tidak menerima dokumen lamaran peserta, untuk itu dihimbau kepada seluruh pelamar agar mengisi data dan mengunggah dokumen lamaran sesuai ketentuan, serta memastikan kembali semua data lamaran dengan benar pada laman resume sebelum mengakhiri proses pendaftaran.

V. UNGGAH DOKUMEN

Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk *soft copy* yang *discan*, meliputi:

1. *Selfie* dengan memegang Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun.
2. Asli surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Lembata (**dibuat menurut contoh sebagaimana terlampir**), ditulis tangan dengan huruf kapital menggunakan tinta hitam di atas kertas folio bergaris yang ditandatangani sendiri oleh pelamar di atas meterai Rp. 10.000,-, dalam 1 file pdf dengan ukuran maksimal 500 kB.

3. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk jpg dengan ukuran maksimal 500 kB.
4. Asli surat pernyataan 5 (lima) poin dan asli surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Lembata paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS. Kedua surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas meterai Rp.10000,-, dalam bentuk pdf dengan ukuran 1000 kB. **Surat pernyataan tersebut diketik sesuai contoh terlampir.**
5. Asli Ijazah yang digunakan untuk melamar dalam bentuk pdf dengan ukuran maksimal 1000 kB.
6. Asli Transkrip Nilai dalam 1 file pdf dengan ukuran 1000 kB;
7. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm berlatar belakang merah dalam bentuk jpg dengan ukuran maksimal 300 kB.
8. Asli surat keterangan disabilitas dari dokter pada unit kesehatan milik pemerintah (Rumah sakit/Puskesmas) khusus bagi pelamar penyandang disabilitas.
9. Asli STR yang masih berlaku bagi jabatan tenaga kesehatan yang dipersyaratkan dalam bentuk pdf dengan ukuran maksimal 1000 kB.

Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara online agar mengunduh dan mencetak kartu tanda bukti pendaftaran seleksi CPNS Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021.

VI. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada portal SSCASN BKN dan situs resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata (<https://lembatakab.go.id>).
2. Jadwal pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 akan disampaikan kemudian.

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang diunggah (*upload*) pelamar pada portal SSCASN.
2. Kelulusan SKD dan SKB didasarkan pada nilai ambang batas/*passing grade* yang ditentukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.
3. Kelulusan seleksi CPNS Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 ditentukan berdasarkan pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Tim Pelaksana PANSELNAS.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Untuk mengetahui legalitas seluruh dokumen pelamar tersebut di atas, panitia seleksi akan melakukan *crosscheck* keabsahan data-data tersebut melalui beberapa pangkalan data/website resmi milik pemerintah;
2. Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 ini tidak dipungut biaya atau dalam bentuk apapun. Apabila terdapat pihak-pihak tertentu yang menjanjikan kelulusan dengan meminta

sejumlah biaya, maka panitia seleksi tidak bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

3. Untuk informasi yang belum jelas dapat berkonsultasi langsung pada sekretariat panitia seleksi daerah di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, atau melalui Group Facebook: HELPDESK SELEKSI CPNS KABUPATEN LEMBATA atau dengan mengakses informasi melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://lembatakab.go.id> dan media sosial.
4. Pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu atau mengisi data dan mengunggah dokumen lamaran yang tidak benar dan/atau tidak jelas (tidak dapat dibaca), akan digugurkan pada saat seleksi administrasi. Untuk itu dihimbau kembali kepada setiap pelamar agar mengecek semua data lamaran dengan benar pada laman resume sebelum mengakhiri proses pendaftaran. Apabila masih terdapat kesalahan atau kekurangan data lamaran dapat dilengkapi kembali sebelum mengakhiri proses pendaftaran.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Lembata;
Arsip.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 777 TAHUN 2021

**TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-49/MK.02/2021 tanggal 25 Januari 2021;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.65-7/93 tanggal 4 Januari 2021;
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021;
 4. Surat Bupati Lembata Nomor : TUK.840/1.683/BKD-PSDM/IX/2020 tanggal 7 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lembata sejumlah **350** (tiga ratus lima puluh) dengan rincian Tenaga Guru sejumlah **152** (seratus lima puluh dua), Tenaga Kesehatan sejumlah **132** (seratus tiga puluh dua), dan Tenaga Teknis sejumlah **66** (enam puluh enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

KEDUA : Masa Hubungan Perjanjian Kerja Jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;

- KETIGA** : Hubungan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA atau selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru pada Instansi Pemerintah Daerah merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik Dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021;
- KELIMA** : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Lembata dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Lembata;
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 29 APRIL 2021

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**



Tembusan:

1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2021**

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	50305126	SD NEGERI LAMAU
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	50304418	SD INPRES DULITUKAN
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	50306162	SD SMP SATU ATAP TOBOTANI
4.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	50304525	SD INPRES LUKU
5.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	50304521	SD INPRES MULEWAQ
6.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	50304427	SD NEGERI BAOPIKANG
7.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	50304399	SD NEGERI DOLU, OLONG
8.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	50304516	SD INPRES PANAMA
9.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	50304425	SD INPRES ATULALENG
10.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	50306166	SMP NEGERI 2 LEBATUKAN
11.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	50304479	SD INPRES TOBOTANI
12.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	50304460	SD INPRES ARAMENGI
13.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	50304523	SD INPRES MOLELEMA
14.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	50304511	SD INPRES LEBE
15.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	50304423	SD INPRES BALAJIRING
16.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	50304450	SD INPRES ARAMENGI
17.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	50304420	SD INPRES BATA
18.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	50304516	SD INPRES PANAMA
19.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	50304410	SD NEGERI WAILOLONG
20.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	50304509	SD INPRES LEUBURI
21.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	50304426	SD INPRES ATALOJO
22.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	50306022	SMP NEGERI 4 LEBATUKAN SATAP LEWODOLI
23.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	50309424	SMP NEGERI 02 OMESURI SATU ATAP WAILOLONG
24.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	69950284	SMP NEGERI 3 OMESURI
25.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	69950825	SMP NEGERI 4 WULANDONI
26.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	50304374	SMP NEGERI 2 NAGAWUTUNG
27.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	50306161	SMPN SATU ATAP ILEWUTUNG
28.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	50304373	SMP NEGERI 2 WULANDONI
29.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	50306158	SD SMP SATU ATAP TEWAOWUTUNG
30.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	69888485	SMP NEGERI 3 WULANDONI SATU ATAP LABALA
31.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	50304385	SMP NEGERI 1 ATADEI
32.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	50304389	SMP NEGERI 5 OMESURI
33.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	50306160	SMP NEGERI SATU ATAP LEWAJI
34.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	69950288	SMP NEGERI 4 OMESURI
35.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	50304380	SMP NEGERI 1 WULANDONI
36.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	50309022	SMP NEGERI 4 LEBATUKAN SATAP LEWODOLI
37.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50304388	SMP NEGERI 2 ATADEI
38.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50308941	SMP NEGERI 02 ILE APE TIMUR SATU ATAP WA/WARU
39.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50304374	SMP NEGERI 2 NAGAWUTUNG
40.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50304389	SMP NEGERI 5 OMESURI
41.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50304373	SMP NEGERI 2 WULANDONI
42.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50306162	SD SMP SATU ATAP TOBOTANI
43.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	69950825	SMP NEGERI 4 WULANDONI
44.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	69950284	SMP NEGERI 3 OMESURI
45.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50309424	SMP NEGERI 02 OMESURI SATU ATAP WAILOLONG
46.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50304380	SMP NEGERI 1 WULANDONI
47.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50306166	SMP NEGERI 2 LEBATUKAN
48.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50309119	SMP NEGERI 04 ATADEI SATU ATAP ILEKIMOK
49.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50306161	SMPN SATU ATAP ILEWUTUNG
50.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50306158	SD SMP SATU ATAP TEWAOWUTUNG
51.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50306134	SD SMP SATU ATAP PASIR PUTHI
52.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50309022	SMP NEGERI 4 LEBATUKAN SATAP LEWODOLI
53.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	50306159	SD SMP SATU ATAP 02 BEAN
54.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	69888485	SMP NEGERI 3 WULANDONI SATU ATAP LABALA
55.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	50304374	SMP NEGERI 2 NAGAWUTUNG
56.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	50309119	SMP NEGERI 04 ATADEI SATU ATAP ILEKIMOK
57.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	69950825	SMP NEGERI 4 WULANDONI
58.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	69930508	SMP NEGERI 3 ILE APE TIMUR SATU ATAP HAMAHENA

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
59.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	50306158	SD SMP SATU ATAP TEWAOWUTUNG
60.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	50304373	SMP NEGERI 2 WULANDONI
61.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	69950825	SMP NEGERI 4 WULANDONI
62.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	50304371	SMP NEGERI 5 LEBATUKAN
63.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	50304483	SD INPRES 92 BEAN
64.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	50304421	SD INPRES BARENG
65.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	50304399	SD NEGERI DOLULOLONG
66.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	50304439	SD INPRES HULE
67.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	50304410	SD NEGERI WALOLOLONG
68.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	69866454	SD NEGERI WOWONG
69.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	50304423	SD INPRES BALAURING
70.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	50304504	SD INPRES 2 LEWOLIBA
71.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	50304509	SD INPRES LEUBURI
72.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	69950288	SMP NEGERI 4 OMESURI
73.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	50304368	SMP NEGERI 2 ATADEI
74.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	50306158	SD SMP SATU ATAP TEWAOWUTUNG
75.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	50306160	SMP NEGERI SATU ATAP LEWAJI
76.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	69950825	SMP NEGERI 4 WULANDONI
77.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	50304369	SMP NEGERI 5 OMESURI
78.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304404	SD NEGERI NORMAL
79.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	69831962	SD NEGERI PENKENEK
80.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304319	SD NEGERI LEREK
81.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304417	SD INPRES LAMALERA
82.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	69866454	SD NEGERI WOWONG
83.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304487	SD INPRES WAIMUDA
84.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304419	SD INPRES DULIR
85.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50305131	SD NEGERI WAIFEI
86.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304450	SD INPRES ARAMENGI
87.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304493	SD INPRES WAOWALA
88.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304430	SD NEGERI LAMHORA
89.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304399	SD NEGERI DOLULOLONG
90.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304421	SD INPRES BARENG
91.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304491	SD INPRES TAPOSARAN
92.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304509	SD INPRES LEUBURI
93.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304516	SD INPRES PANAMA
94.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304484	SD INPRES RUMANG
95.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50305715	SD NEGERI LAMAMANJ
96.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304500	SD INPRES PAULOLO
97.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304423	SD INPRES BALAURING
98.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304438	SD INPRES ILE KIMOK
99.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304427	SD INPRES ATAU
100.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304426	SD INPRES ATALOJO
101.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304486	SD INPRES POSIWATU
102.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304390	SMP NEGERI 1 WULANDONI
103.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304496	SD INPRES WAIWEJAK
104.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304322	SD NEGERI WATUWARA
105.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304431	SD INPRES LAMADALE
106.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304433	SD INPRES LABALIMUT
107.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304506	SD INPRES LEWAJI
108.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304414	SD NEGERI ROMA
109.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50309119	SMP NEGERI 04 ATADEI SATU ATAP ILEKIMOK
110.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	69950288	SMP NEGERI 4 OMESURI
111.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	69950825	SMP NEGERI 4 WULANDONI
112.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304503	SD INPRES LITE
113.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304397	SD NEGERI KARTINI LABALA
114.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	69866450	SDN ATAKOWA
115.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304479	SD INPRES TOBOTANI
116.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304502	SD INPRES LAMALEWAR
117.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304408	SD NEGERI WULANDONI
118.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304396	SD NEGERI LEUWALANG
119.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304437	SD INPRES ILOWUTUNG
120.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304522	SD INPRES MUDALEREK
121.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304420	SD INPRES BATA
122.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	50304410	SD NEGERI WALOLOLONG
123.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	69950288	SMP NEGERI 4 OMESURI
124.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	50309022	SMP NEGERI 4 LEBATUKAN SATAP LEWOODLI
125.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	50305134	SD SMP SATU ATAP PASIR PUTIH

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
126.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	69950304	SMP NEGERI 3 ILE APE
127.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	50305133	SMP NEGERI SATAP HOLORIANG
128.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	69856249	SMP NEGERI 4 NUBATUKAN
129.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	50306166	SMP NEGERI 2 LEBATUKAN
130.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	50309024	SMP NEGERI 3 NUBATUKAN SATU ATAP PAUBOKOL
131.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	50304380	SMP NEGERI 1 WULANDON
132.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	1	50304385	SMP NEGERI 1 ATADEI
133.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	1	50304380	SMP NEGERI 1 WULANDON
134.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	50304374	SMP NEGERI 2 NAGAWUTUNG
135.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	69950288	SMP NEGERI 4 OMESURI
136.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	50306161	SMPN SATU ATAP ILEWUTUNG
137.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	50306166	SMP NEGERI 2 LEBATUKAN
138.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	50304385	SMP NEGERI 1 ATADEI
139.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	50304384	SMP NEGERI ILE APE
140.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	50304367	SMP NEGERI 1 BUYASURI
141.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	50304382	SMP NEGERI 1 NUBATUKAN
142.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	50306169	SMP NEGERI 2 NUBATUKAN
143.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	50304380	SMP NEGERI 1 WULANDON
144.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	69950268	SMP NEGERI 4 OMESURI
145.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	50304381	SMP NEGERI 1 OMESURI
146.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	50309024	SMP NEGERI 3 NUBATUKAN SATU ATAP PAUBOKOL
147.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	69856249	SMP NEGERI 4 NUBATUKAN
148.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	50304385	SMP NEGERI 1 ATADEI
149.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	69950304	SMP NEGERI 3 ILE APE
150.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	50309424	SMP NEGERI 02 OMESURI SATU ATAP WAILOLONG
151.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	69756313	SMP NEGERI 08 NUBATUKAN
152.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	50304386	SMP NEGERI 1 ILE APE TIMUR
	TOTAL	152		

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	0	P53080302 01.	PUSKESMAS WAIPUKANG
2.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAURING
3.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	0	P53080202 01.	PUSKESMAS WAIKNUIT
4.	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	0	P53080502 01.	PUSKESMAS LEWOLEBA
5.	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAURING
6.	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI
7.	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	0	P53080202 01.	PUSKESMAS WAIKNUIT
8.	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	0	P53080312 01.	PUSKESMAS LAMAAU
9.	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG
10.	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	0	P53080302 01.	PUSKESMAS WAIPUKANG
11.	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA
12.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	0	P53080602 01.	PUSKESMAS LEWOLEBA
13.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	0	R5308045	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
14.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG
15.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	R5308045	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
16.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU PUOR A
17.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU BAOPANA
18.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU LAMALERA A
19.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG PUSTU ALUROBA
20.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080202 01.	PUSKESMAS WAIKNUIT PUSTU LEREK
21.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG PUSTU BARENG
22.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080312 01.	PUSKESMAS LAMAAU
23.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080302 01.	PUSKESMAS WAIPUKANG
24.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080312 01.	PUSKESMAS LAMAAU PUSTU WAIWARU
25.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080202 01.	PUSKESMAS WAIKNUIT
26.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080502 01.	PUSKESMAS LEWOLEBA
27.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAURING
28.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI
29.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU TAPOLANGU
30.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESI	DOKTER SPESIALIS ANESTESI	1	0	R5308045	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
31.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	0	R5308045	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
32.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	0	R5308045	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
33.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
34.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA
35.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI / S-1 GIZI	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA
36.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI / S-1 GIZI	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAURING
37.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI / S-1 GIZI	1	0	P53080502 01.	PUSKESMAS LEWOLEBA
38.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI / S-1 GIZI	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG
39.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI / S-1 GIZI	1	0	P53080202 01.	PUSKESMAS WAIKNUIT
40.	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	D-IV KEPERAWATAN ANESTESI + NERS	1	0	R5308045	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
41.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG
42.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAURING
43.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	0	P53080202 01.	PUSKESMAS WAIKNUIT
44.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	0	P53080312 01.	PUSKESMAS LAMA AU
45.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	0	P53080302 01.	PUSKESMAS WAIKUPANG
46.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	2	0	R5308045	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
47.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA
48.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	2	0	P53080502 01.	PUSKESMAS LEWOLEBA
49.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	0	P53080502 01.	PUSKESMAS LEWOLEBA
50.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAURING
51.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI
52.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	0	R5308045	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
53.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG
54.	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III PERAWAT ANESTESI	1	0	R5308045	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
55.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG POLINDES RUMANG
56.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG POLINDES ATULALENG
57.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080312 01.	PUSKESMAS LAMA AU POLINDES TODANARA
58.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU PUOR A
59.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAURING POLINDES HOLEA B
60.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG POLINDES TUBUNG WALANG
61.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAURING POLINDES DOLULOLONG
62.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAURING POLINDES PEUSAWAH
63.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080312 01.	PUSKESMAS LAMA AU
64.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAURING POLINDES PANAMA
65.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAURING POLINDES LEUBATANG
66.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI POLINDES LAMAMANUK
67.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAURING POLINDES NORMAL B

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
66.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAIRING PUSTU NORMAL
69.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG POLINDES LOYOBORHOR
70.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI / D-III EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU PUOR A
71.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI / D-III EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU TAPOLANGU
72.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI / D-III EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG PUSTU BARENG
73.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI / D-III EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU LODOTODOKOWA
74.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI / D-III EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080312 01.	PUSKESMAS LAMAAU PUSTU WARMATAN
75.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI / D-III EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080302 01.	PUSKESMAS WAIPUKANG PUSTU DULITUKAN
76.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI / D-III EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU BELOBAO
77.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI / D-III EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU LEWORAJA
78.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI / D-III EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU DIKESARE
79.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI / D-III EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU SERANGGORANG
80.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI / D-III EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU LAMALERA A
81.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI / D-III EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080502 01.	PUSKESMAS LEWOLEBA
82.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI / D-III EPIDEMIOLOGI	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG PUSTU BEAN
83.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI (NUTRISIONIS)	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU PUOR A
84.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI (NUTRISIONIS)	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAIRING PUSTU ATANLA
85.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI (NUTRISIONIS)	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAIRING PUSTU MELLUWITING
86.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU SERANGGORANG
87.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI (NUTRISIONIS)	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU LAMALERA A
88.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI (NUTRISIONIS)	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU BELOBAO
89.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI (NUTRISIONIS)	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU LODOTODOKOWA
90.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI (NUTRISIONIS)	1	0	P53080502 01.	PUSKESMAS LEWOLEBA
91.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI (NUTRISIONIS)	1	0	P53080302 01.	PUSKESMAS WAIPUKANG PUSTU DULITUKAN
92.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI (NUTRISIONIS)	1	0	P53080312 01.	PUSKESMAS LAMAAU PUSTU WAIWARU
93.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI (NUTRISIONIS) / D-III KESEHATAN GIZI	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU DIKESARE
94.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI (NUTRISIONIS)	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU TAPOLANGU
95.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI (NUTRISIONIS)	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAIRING PUSTU LEUWAYANG
96.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG PUSTU ROHO
97.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI (NUTRISIONIS)	1	0	P53080601 01.	PUSKESMAS BALAIRING PUSTU WALANGSAWAH
98.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI / D-III GIZI (NUTRISIONIS)	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG PUSTU TOBOTANI
99.	TERAMPIL - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-III PROMOSI KESEHATAN	1	0	P53080401 01.	PUSKESMAS HADAKEWA
100.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080702 01.	PUSKESMAS WAIRIANG PUSTU TOBOTANI
101.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080112 01.	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU PUOR A

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
102.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080401	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU LODOTODOKOWA
103.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080112	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU LAMALERA A
104.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080702	PUSKESMAS WAIRIANG PUSTU ALIUROBA
105.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080202	PUSKESMAS WAKNUIT
106.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080202	PUSKESMAS WAKNUIT PUSTU LEREK
107.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080401	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU DIKESARE
108.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080601	PUSKESMAS BALAURING PUSTU MELUWITING
109.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080502	PUSKESMAS LEWOLEBA PUSTU PADA
110.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080601	PUSKESMAS BALAURING PUSTU WALANGSAWAH
111.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080702	PUSKESMAS WAIRIANG PUSTU ROHO
112.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080702	PUSKESMAS WAIRIANG PUSTU BARENG
113.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080112	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU BELOBAC
114.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	0	P53080702	PUSKESMAS WAIRIANG PUSTU BEAN
115.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III LABORATORIUM KESEHATAN/MEDIS	1	0	P53080112	PUSKESMAS WULANDONI
116.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	0	P53080112	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU BELOBAC
117.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN SANITASI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	P53080601	PUSKESMAS BALAURING PUSTU LEUWAYANG
118.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	0	P53080401	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU LODOTODOKOWA
119.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	0	P53080601	PUSKESMAS BALAURING PUSTU NORMAL
120.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN SANITASI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	P53080112	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU PUOR A
121.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	0	P53080112	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU LAMALERA A
122.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	0	P53080601	PUSKESMAS BALAURING PUSTU MELUWITING
123.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	0	P53080202	PUSKESMAS WAKNUIT
124.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	0	P53080112	PUSKESMAS WULANDONI PUSTU LEWORAJA
125.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	0	P53080312	PUSKESMAS LAMAALU PUSTU WAWARU
126.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	0	P53080401	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU DIKESARE
127.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	0	P53080702	PUSKESMAS WAIRIANG PUSTU BEAN
128.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	0	P53080601	PUSKESMAS BALAURING PUSTU ATANLA
129.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	0	P53080401	PUSKESMAS HADAKEWA PUSTU TAPOLANGU
130.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN SANITASI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	P53080312	PUSKESMAS LAMAALU PUSTU WAIMATAN
		TOTAL	132	0		

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	1	0	DINAS PETERNAKAN BIDANG BINA USAHA, PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA SEKSI SUMBER DAYA LAHAN DAN AIR
2.	AHLI PERTAMA - PENERA	S-1 MIPA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK MESIN PRODUKSI / D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN / S-1 MATEMATIKA	1	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PETERNAKAN PEMULIAAN TERNAK / S-1 PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN	1	0	DINAS PETERNAKAN
4.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	S-1 PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK / D-IV TEKNOLOGI PAKAN TERNAK	1	0	DINAS PETERNAKAN
5.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI PEMERINTAHAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 HUKUM PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM ADM. NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN DAN KEBUJAKAN PUBLIK	1	0	INSPEKTORAT
6.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN EKONOMI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI PEMERINTAHAN / S-1 D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 D-IV EKONOMI AKUNTANSI	1	0	ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
7.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	S-1 PERTANIAN USAHA TANI / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 PERTANIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 HAMA PENYAKIT PERTANIAN / D-IV BUDIDAYA PERTANIAN	1	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
8.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT / S-1 SOSIATRI / S-1 EKONOMI PEMERINTAHAN / S-1 SOSIOLOGI / D-IV SOSIOLOGI / D-IV SOSIATRI / D-IV PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN	1	0	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA
9.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN	1	0	DINAS PETERNAKAN BIDANG BINA USAHA, PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA SEKSI SUMBER DAYA LAHAN DAN AIR
10.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN BERCOBOK TANAM / S-1 PERTANIAN USAHA TANI / S-1 PERTANIAN SOSIOLOGI PRODUKSI TANAMAN / S-1 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 PERTANIAN ILMU TANAMAN SETAHUN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN AGRIBISNIS / S-1 sosial ekonomi pertanian / S-1 AGRIBISNIS / D-IV AGRIBISNIS / S-1 AGROTEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI	1	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
11.	AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	0	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN LEGISLASI DAN PERSIDANGAN SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
12.	AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	0	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM DAN HAM SUB BAGIAN ADMINISTRASI PRODUK HUKUM DAERAH
13.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PROGRAM PEMBANGUNAN / S-1 D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN DAN KEBUJAKAN PUBLIK	1	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
14.	AHLI PERTAMA - POLISI RAMONG PRAJA	S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	0	SATUAN POLISI RAMONG PRAJA
15.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / S-2 PERPUSTAKAAN	1	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
16.	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN / S-1 PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN / D-IV PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
17.	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN HIDUP	1	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
18.	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 ARSITEKTUR LANSEKAP / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR LANDSCAPE / S-1 TEKNIK BANGUNAN / S-1 ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK BANGUNAN	1	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
19.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ARSIP / D-III ARSIPARIS	1	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
20.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ARSIP / D-III ARSIPARIS	1	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
21.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ARSIP / D-III ARSIPARIS	1	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
22.	TERAMPIL - AUDITOR	D-III EKONOMI MANAJEMEN / D-III EKONOMI AKUNTANSI / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN AKUNTANSI / D-III PERPAJAKAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI KEUANGAN	2	0	INSPEKTORAT
23.	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III PETERNAKAN	2	0	DINAS PETERNAKAN BIDANG BINA USAHA, PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA SEKSI SUMBER DAYA LAHAN DAN AIR
24.	TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK	D-III PETERNAKAN	1	0	DINAS PETERNAKAN
25.	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	D-III BUDIDAYA PERTANIAN / D-III HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / D-III PENGENDALIAN HAMA TERPADU	1	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
26.	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	1	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
27.	TERAMPIL - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	D-III TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN / D-III TEKNIK SIPIL	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN
28.	TERAMPIL - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	D-III PENYEHATAN LINGKUNGAN / D-III TEKNIK LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
29.	TERAMPIL - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	D-III TEKNIK BANGUNAN GEDUNG / D-III TEKNIK BANGUNAN DAN PERUMAHAN / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III ARSITEK	1	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
30.	ANALIS BENCANA	S-1 TEKNIK GEOLOGI / D-IV TEKNIK GEOLOGI / D-IV SOSIOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 MANAJEMEN	1	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK SEKSI LOGISTIK
31.	ANALIS INDUSTRI	S-1 TEKNIK INDUSTRI / D-IV TEKNIK INDUSTRI	1	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN SEKSI INDUSTRI ANEKA
32.	ANALIS JABATAN	S-1 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN / S-1 ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN SDM / D-IV MANAJEMEN SDM	1	0	ASISTEN ADMINISTRASI REFORMASI BIROKRASI DAN KEUANGAN BAGIAN ORGANISASI SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
33.	ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (ILMU GIZI) / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (INFORMASI KESEHATAN) / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (PROMOSI KESEHATAN) / S-1 KEBIJAKAN KESEHATAN / S-1 FKM ANALIS KEBIJAKAN KESEHATAN	1	0	DINAS KESEHATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
34.	ANALIS KETAHANAN KELUARGA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PSIKOLOGI	1	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA
35.	ANALIS KOMPETENSI	S-1 MANAJEMEN SDM / D-IV MANAJEMEN SDM / S-1 MANAJEMEN PERKANTORAN / D-IV ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 PSIKOLOGI	1	0	ASISTEN ADMINISTRASI REFORMASI BIROKRASI DAN KEUANGAN BAGIAN ORGANISASI SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
36.	ANALIS LALU LINTAS	S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI / S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT / D-IV MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT / S-1 TRANSPORTASI DARAT	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
37.	ANALIS MITIGASI BENCANA	S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI	1	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA SEKSI KESIAPSIAGAAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
38.	ANALIS PAKAN TERNAK	S-1 NUTRISI TERNAK / S-1 NUTRISI MAKANAN TERNAK / S-1 PRODUKSI TERNAK / D-IV PRODUKSI TERNAK / S-1 REPRODUKSI TERNAK / S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK / D-IV TEKNOLOGI PAKAN TERNAK / S-1 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN / S-1 PETERNAKAN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN	1	0	DINAS PETERNAKAN BIDANG PETERNAKAN SEKSI PAKAN, TEKNOLOGI DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN
39.	ANALIS PANGAN	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRIBISNIS SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / D-IV AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI PERTANIAN / D-IV TEKNIK PANGAN / S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 PERTANIAN PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN PANGAN	1	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN BIDANG KETAHANAN PANGAN SEKSI KONSUMSI DAN MUTU PANGAN
40.	ANALIS PEMASARAN HASIL PERTANIAN	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN AGRIBISNIS / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	1	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN BIDANG TANAMAN PERKEBUNAN SEKSI PENANGANAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN, PENGELOLAAN DAN PEMASARAN TANAMAN PERKEBUNAN
41.	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL / S-1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI PEMBANGUNAN / S-1 SOSIOLOGI PEDESAAN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI SOSIAL / S-1 PSIKOLOGI	1	0	KECAMATAN ILE APE SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
42.	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL POLITIK ILMU PEMERINTAH / S-1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT / D-IV PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN / S-1 PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN	1	0	KECAMATAN LEBATUKAN SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
43.	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL POLITIK ILMU PEMERINTAH / D-IV PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN / S-1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN / S-1 PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	1	0	KECAMATAN NAGAWUTUNG SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
44.	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	S-1 EKONOMI KEUANGAN / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S-1 MANAJEMEN EKONOMI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN EKONOMI KEUANGAN / S-1 KEUANGAN DAERAH / D-IV KEUANGAN DAERAH / S-1 EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN AKUNTANSI PEMERINTAHAN	1	0	BADAN KEUANGAN DAERAH BIDANG PELAKSANAAN PENDAPATAN SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN
45.	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN BIDANG SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN SEKSI PELAYANAN PENGADUAN
46.	ANALIS PENDEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	S-1 SOSIOLOGI PEDESAAN / S-1 PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	0	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT, PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
47.	ANALIS PERIKANAN BUDIDAYA	S-1 PERIKANAN BIDANG AQUAKULTURE / S-1 PERIKANAN BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 PERIKANAN TEHNIK PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	1	0	DINAS PERIKANAN BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA, PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEKSI PERIKANAN BUDIDAYA
48.	ANALIS PERIKANAN BUDIDAYA	S-1 PERIKANAN BIDANG AQUAKULTURE / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / D-IV BUDIDAYA PERIKANAN	1	0	DINAS PERIKANAN BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA, PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEKSI SARANA PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA
49.	ANALIS SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK SIPIL SUMBER DAYA AIR / S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN BIDANG SUMBER DAYA AIR SEKSI PENGEMB. SISTEM IRIGASI DAN PENATAGUNAAN SD AIR
50.	PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN / S-1 ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN BIDANG TATA RUANG DAN CIPTA KARYA SEKSI TATA BANGUNAN DAN TATA LINGKUNGAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
51.	PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN BIDANG BINA MARGA SEKSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN JALAN KABUPATEN
52.	PENGAWAS LALU LINTAS DARAT	S-1 TRANSPORTASI DARAT / D-IV TRANSPORTASI DARAT / S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT / D-IV MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT / D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS ANGGUTAN JALAN SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN
53.	PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG / S-1 TEKNIK BANGUNAN / D-IV TEKNIK BANGUNAN / S-1 TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN / S-1 TEKNIK BANGUNAN DAN PERUMAHAN	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN BIDANG TATA RUANG DAN CIPTA KARYA SEKSI TATA BANGUNAN DAN TATA LINGKUNGAN
54.	PENGAWAS TATA RUANG	S-1 TEKNIK SIPIL, PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH / D-IV PERENCANA WILAYAH KOTA	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN BIDANG TATA RUANG DAN CIPTA KARYA SEKSI PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG
55.	PENGELOLA BAHAN PUSTAKA	D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN BIDANG PEMBINAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKSI PENGEMBANGAN, PELESTARIAN, DAN PENGELOLAAN BAHAN PERPUSTAKAAN
56.	PENYULUH BENCANA	S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 REHABILITASI SOSIAL	1	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA SEKSI PENCEGAHAN
57.	PENYULUH KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA	S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (INFORMASI KESEHATAN) / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (ILMU GIZI) / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (PROMOSI KESEHATAN)	1	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA
58.	PENYULUH KOPERASI	S-1 ADMINISTRASI KOPERASI / S-1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S-1 MANAJEMEN EKONOMI KEUANGAN / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-IV ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG KOPERASI SEKSI BINA USAHA, KEMITRAAN DAN PERMODALAN KOPERASI
59.	PENYULUH OBAT DAN MAKANAN	S-1 KEBIJAKAN KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (ILMU GIZI) / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (INFORMASI KESEHATAN) / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (PROMOSI KESEHATAN)	1	0	DINAS KESEHATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
60.	PENYULUH PANGAN	S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S-1 PERTANIAN PANGAN / S-1 TEKNIK PANGAN / D-IV TEKNIK PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN PANGAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN BIDANG KETAHANAN PANGAN SEKSI DISTRIBUSI DAN PEMANTAUAN HARGA PANGAN
61.	PENYULUH WISATA	S-1 MANAJEMEN PARIWISATA / S-1 D-IV PARIWISATA / D-IV MANAJEMEN PARIWISATA	1	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA SEKSI PENGEMBANGAN OBYEK DAYA TARIK WISATA
62.	PRANATA REPRODUKSI ARSIP	D-III KEARSIPAN / D-III ARSIP / D-III ARSIPARIS	1	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN BIDANG PENGELOLAAN, LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP SEKSI AKUISISI, PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAN PREVENSI ARSIP
63.	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III EKONOMI AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN AKUNTANSI / D-III KEUANGAN DAERAH / D-III EKONOMI MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III EKONOMI KEUANGAN / D-III AKUNTANSI / D-III EKONOMI ADMINISTRASI KEUANGAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	1	0	KECAMATAN ATADEI SEKSI PEMERINTAHAN DESA
64.	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III EKONOMI AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN AKUNTANSI / D-III KEUANGAN DAERAH / D-III AKUNTANSI / D-III EKONOMI KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III EKONOMI MANAJEMEN / D-III EKONOMI ADMINISTRASI KEUANGAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	1	0	KECAMATAN ILE APE SEKSI PEMERINTAHAN DESA
TOTAL			66	0	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



TJAHJO KUMOLO



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 863 /M.SM.01.00/2021

24 Juni 2021

Sifat : Segera

Lampiran : 1

Hal : **Penjelasan Teknis Penyesuaian Kualifikasi Pendidikan
Pada Penetapan Kebutuhan ASN Tahun 2021**

YTH.

**PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH
(DAFTAR TERLAMPIR)**

DI

TEMPAT

Menindaklanjuti Keputusan Menteri PANRB tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2021 yang telah disampaikan kepada Saudara, terdapat penetapan kebutuhan/formasi di suatu jabatan dengan syarat kualifikasi pendidikan yang berbeda jenjang pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan penjelasan teknis sebagai berikut:

1. Penetapan kebutuhan/formasi yang memiliki syarat kualifikasi pendidikan yang berbeda jenjang pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian syarat kualifikasi pendidikan sebagaimana terlampir;
2. Instansi harap mengumumkan penetapan kebutuhan/formasi sesuai dengan syarat kualifikasi yang sudah disesuaikan sebagaimana dimaksud angka 1;
3. Penyesuaian syarat kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud angka 1, akan disesuaikan pula pada SSCASN BKN.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**AN. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
SEKRETARIS KEMENTERIAN PANRB,**

DWI WAHYU ATMAJI

Tembusan:

1. Menteri PANRB;
2. Kepala BKN;
3. Kepala BPKP.

Lampiran

Nomor : B/ 863 /M.SM.01.00/2021

Tanggal : 24 Juni 2021

**RINCIAN PENYESAIAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PADA PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN		ALOKASI CPNS	UNIT KERJA PENEMPATAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / S-2 PERPUSTAKAAN	S-1 PERPUSTAKAAN	1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

CONTOH SURAT LAMARAN UNTUK MENGIKUTI SELEKSI CPNS KABUPATEN
LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2021

LEWOLEBA, JUNI 2021

NOMOR : 01/AMB/CPNS /LBT/VI/2021
LAMPIRAN : 1 (SATU) JEPIT
PERIHAL : PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPADA
YTH. BAPAK BUPATI
LEMBATA
DI –
TEMPAT

DENGAN HORMAT,

SAYA YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI:

NAMA : ANGELA MARICI BATUTARA
TEMPAT LAHIR : LEWOLEBA
TANGGAL LAHIR : 13 JANUARI 1988
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
STATUS PERKAWINAN : KAWIN
AGAMA : KATHOLIK
PENDIDIKAN : APOTEKER
ALAMAT : DESA AMAKAKA RT/RW 002/001
KECAMATAN ILE APE KABUPATEN
LEMBATA

BERSAMA INI SAYA DATANG KEHADAPAN BAPAK, KIRANYA SAYA DAPAT MENGIKUTI SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) PADA PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2019.

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI SEBAGAI BERIKUT:

1. FOTO KOPI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP)/SURAT KETERANGAN 1 (SATU LEMBAR) YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
2. FOTO KOPI IJAZAH 1 (SATU) LEMBAR YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG;
3. FOTO KOPI TRANSKRIP NILAI 1 (SATU) LEMBAR YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG;
4. FOTO KOPI SURAT TANDA REGISTRASI (STR) 1 (SATU) LEMBAR YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG; *(khusus bagi pelamar pada formasi tenaga kesehatan)*
5. FOTO KOPI SERTIFIKAT PENDIDIK 1 (SATU) LEMBAR YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG; *(khusus bagi pelamar pada formasi tenaga pendidikan, jika ada)*
6. PAS FOTO UKURAN 3 X 4 CM SEBANYAK 2 (DUA) LEMBAR, BERLATAR BELAKANG DENGAN MENULISKAN NAMA DAN TANGGAL LAHIR DI BALIK PAS FOTO TERSEBUT; DAN
7. FOTO KOPI SURAT KETERANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG. *(khusus bagi pelamar yang pada ijazahnya tidak tercantum akreditasi program studi)*
8. ASLI SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK TMT PNS.

DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA UNTUK DAPAT DIPERTIMBANGKAN SEPERLUNYA.

HORMAT SAYA,

Meterai
Rp.10000 TTD

ANGELA MARICI BATUTARA

SURAT PERNYATAAN
Nomor: CASN...../...../2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

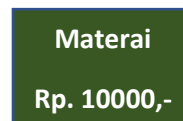
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2021

Yang membuat pernyataan,



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Agama :
Alamat :

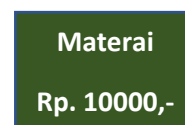
Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
6. Bersedia mengabdikan dan tidak akan mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada **<Nama Instansi>**.
7. *)
8. *)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, guna melengkapi syarat khusus/tambahan yang dipersyaratkan pada **<Nama Instansi>**. Apabila dikemudian hari saya mengingkari pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya bersedia menerima sanksi apapun yang akan dijatuhkan terhadap saya.

....., 2021

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Template Format Surat Pernyataan Instansi dapat berbeda pada setiap instansi

**) Persyaratan lain yang dipersyaratkan dapat berbeda-beda pada setiap Instansi, dimohon untuk mengacu pada pengumuman surat persyaratan instansi yang dituju*